

Pengaruh *Financial Distress*, *Deferred Tax Expense* Dan *Debt Policy* Terhadap *Tax Avoidance*

Nur De Afni Melani¹⁾, Ferdiansyah²⁾

^{1,2} Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Pamulang.
^{1,2)} nurdeafni07@gmail.com, dosen02423@unpam.ac.id

ABSTRACT

One way to achieve tax retention is through tax avoidance, which involves legally reducing the tax burden and avoiding conflicts with tax regulations. This study aims to analyze the effect of financial distress, deferred tax expense, and debt policy on tax avoidance. The sample used in this study consists of 9 property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period from 2018 to 2022, using multiple linear regression with purposive sampling technique. The data used in this study are secondary data in the form of financial reports from each company that has been selected as the research sample. The results of this study indicate that, partially, financial distress and debt policy do not affect tax avoidance because not all companies react to financial distress or utilize debt policy for tax avoidance. Deferred tax expense has an effect on tax avoidance due to the company's efforts to exploit gaps in accounting and tax regulations to manage tax liabilities legally. Simultaneously, financial distress, deferred tax expense, and debt policy affect tax avoidance, reflecting that companies use various strategies to legally minimize tax burdens, considering their financial condition and capital structure.

ABSTRAK

Salah satu cara untuk mencapai retensi pajak adalah melalui penghindaran pajak, yaitu pengurangan beban pajak secara sah dan menghindari konflik dengan peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *financial distress*, *deferred tax expense* dan *debt policy* terhadap *tax Avoidance*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 9 perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2018 hingga tahun 2022 dengan menggunakan regresi linier berganda dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dari setiap perusahaan yang telah dijadikan sampel penelitian. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *Financial Distress* dan *Debt Policy* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dikarenakan tidak semua perusahaan bereaksi terhadap *Financial Distress* atau memanfaatkan *Debt Policy* untuk melakukan *Tax Avoidance*, *Deferred Tax Expense* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* karena adanya upaya perusahaan memanfaatkan celah dalam aturan akuntansi dan pajak untuk mengelola kewajibannya secara legal, dan secara simultan *Financial Distress*, *Deferred Tax Expense* dan *Debt Policy* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* hal ini mencerminkan bahwa perusahaan memanfaatkan berbagai strategi untuk meminimalkan beban pajak secara legal, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan struktur modalnya.

Kata kunci: *Financial Distress ; Deferred Tax Expense ; Debt Policy ; Tax Avoidance*

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur”. Pemerintah mengabdikan diri untuk menerapkan berbagai strategi untuk mencapai tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk itu pemerintah baik pusat maupun daerah mencari upaya untuk mendapatkan pemasukan kedalam Pendapatan Negara. Dampaknya, pemerintah meningkatkan tingkat pendapatan pusat dan daerah guna mencapai tujuan pembangunan

(Fikarunia & Ferdiansyah, 2022). Salah satu bentuk kontribusi masyarakat terhadap pembangunan negara adalah melalui perpajakan. Sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia adalah pajak, realisasi penerimaan negara dari sektor pajak tidak stabil, kadang meningkat, dan kadang menurun (Suhaidar et al., 2022).

Keberadaan pajak dianggap menjadi beban yang mengakibatkan jumlah pendapatan ataupun keuntungan yang diterima berkurang sehingga ada indikasi untuk meminimalkan tagihan pajaknya (Dewi & Estrini, 2024) Dalam praktiknya, perpajakan di Indonesia mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Kedua, penegakan hukum moral masih rendah. Ketiga, tarif pajak yang

terlalu tinggi dan cara perpajakan yang terlalu rumit, dan keempat lebih makro, kekuasaan direktur jenderal pajak masih terlalu besar karena mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga menimbulkan konflik. ketidakadilan distribusi penerimaan pajak yang berdampak pada sejauh mana kepatuhan wajib pajak. Terakhir, kelima, masih rendahnya kepercayaan terhadap petugas pajak dan rumitnya peraturan perpajakan (Chandra & Sundarta, 2022). Salah satu cara untuk mencapai retensi pajak adalah melalui penghindaran pajak, yaitu pengurangan beban pajak secara sah dan menghindari konflik dengan peraturan perpajakan. Terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang properti dan real estate di Indonesia salah satunya disebabkan oleh pembangunan Perumahan Bukit Semarang Baru yang dibangun oleh PT. Karyadeka Alam Sari yang khusus menjual rumah mewah senilai Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun dalam akta notaris hanya disebutkan Rp 940 juta. Artinya terjadi disparitas harga sebesar Rp 6,1 miliar. Transaksi ini mungkin melibatkan pajak 10% untuk pembelian masing-masing sebesar \$750.000 atau \$10 juta. Kekurangan lainnya adalah tarif pajak final atas penghasilan sebesar 5 persen dikalikan Rp6,1 miliar atau Rp300 juta. Seluruh utang pajaknya sebesar Rp 910 juta. Jika pengembang ini menjual ratusan unit rumah kelas atas, negara bisa mengalami kerugian hingga \$24 juta dari satu proyek (Ida Ayu Putu Wira Yanti and I Nyoman Putra Yasa, 2022). Penghindaran pajak menyebabkan negara kehilangan pendapatan ratusan miliar dolar dari sektor pajak setiap tahunnya.

Financial Distress merupakan suatu tahapan kondisi keuangan yang menurun sebelum terjadinya kebangkrutan, Hal ini ditandai dengan ketidakmampuan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kemampuan mengamati status keuangannya agar terhindar dari kesulitan keuangan (Gian et al., 2022). Faktor lain yang mendorong *tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah perluasan kewajiban atau aset pajak tangguhan seperti yang dikemukakan oleh (Panjaitan & Simbolon, 2022). Oleh karena itu, pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan akan berdampak mendorong munculnya beban.

(Ponirah, 2021) menggambarkan *Debt Policy* sebagai kebijakan pendanaan eksternal. Kebijakan utang merupakan bagian dari struktur modal karena merupakan bagian darinya. Terungkapnya utang perusahaan akan menimbulkan biaya tambahan yang bersifat tetap yakni beban bunga. Makin besar hutang suatu perusahaan makin tinggi pula beban bunga yang harus dibayar, serta makin tinggi bunga yang didapat makin besar juga keuntungan yang diperoleh (Putri et al., 2020).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)

(Jensen & Meckling, 1976) menyatakan bahwa hubungan agensi seperti sebuah kotak dimana satu orang atau lebih (*principal*) menggunakan orang lain (*agent*) untuk bekerja atas nama *principal* dimana termasuk mendelegasikan kewenangan kepada *agent* untuk membuat keputusan. Adanya pemisahan wewenang dan perbedaan kepentingan antara pihak *principal* selaku pemilik perusahaan dan *agent* selaku pemegang kendali atas perusahaan dapat memicu timbulnya *conflict of interest* atau biasa disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). Teori agensi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa adanya masalah yang akan timbul antara *stakeholder* sebagai *principal* dan manajemen perusahaan. Terkait dengan *tax avoidance*, masalah agensi dapat terjadi antara perusahaan dan pemerintah.

Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)

Friedman (1970) menyatakan tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemilikinya, sedangkan yang dinamakan *stakeholder* adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi tujuan umum dari suatu organisasi, termasuk kelompok yang dianggap tidak menguntungkan (*adversial-group*) seperti pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan regulator. Manajer perusahaan dapat saja melakukan tindakan *tax avoidance* dalam upaya mengoptimalkan laba perusahaan dengan mengorbankan *stakeholder* lainnya, dalam hal ini tidak hanya pemerintah saja yang dirugikan namun masyarakat juga secara tidak langsung telah dirugikan dengan adanya tindakan tersebut. Meskipun demikian, *stakeholder* pasti akan menanggapi tindakan manajemen perusahaan yang merugikan sehingga *stakeholder* tidak akan memberikan dukungan kepada perusahaan tersebut akibat praktik *tax avoidance* yang telah dilakukannya yang nantinya akan mengancam keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

Teori Sinyal (Signalling Theory)

Teori *signaling* (Spence, 1973) menjelaskan bagaimana seharusnya suatu perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Dalam penelitian, manajer memberikan sinyal untuk mengurangi asimetri informasi sehingga seluruh pemangku kepentingan mempunyai akses terhadap informasi yang sama. Bisa diambil simpulan jika pihak manajemen perusahaan terutama yang sudah *go public* bisa membagikan laporan pada pemilik modal bisa mengamati kondisi rencana serta perusahaan kedepannya.

Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Menurut (Pohan, 2013) penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang. (Rahayu, 2017) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan dalam meminimalkan beban pajak dengan usaha dari Wajib Pajak yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghindaran pajak mengacu pada pengelolaan suatu peristiwa sedemikian rupa sehingga beban pajak diminimalkan atau dihilangkan (Septiani et al., 2024). Dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir atau mengurungi pembayaran pajak perusahaan dengan tidaknya melanggar peraturan undang-undang yang berlaku.

Financial Distress (Kesulitan Keuangan)

Menurut (Arifin, 2019) *financial distress* dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan aliran kas operasi yang dimiliki perusahaan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban-kewajiban yang dimiliki perusahaan. Menurut (Pardosi & Hutabarat, 2022) *financial distress* sebagai kesulitan keuangan adalah suatu tahap sebelum terjadinya kebangkrutan sebuah perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa *financial distress* merupakan kondisi dimana suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan dengan ditandai adanya ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sehingga dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kebangkrutan maupun likuidasi.

Deferred Tax Expense (Beban Pajak Tangguhan)

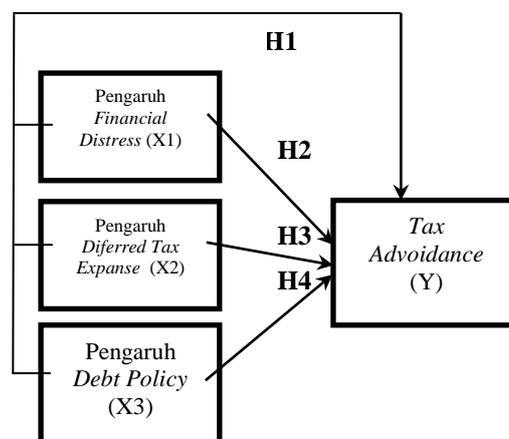
Menurut (Waluyo, 2018) Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan. Pajak Tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (*tax loss carry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Dapat disimpulkan *deferred tax expense* merupakan beban yang timbul karena perbedaan waktu karena dengan adanya perbedaan pengakuan jumlah waktu dalam akuntansi komersial dibandingkan dengan akuntansi fiskal. Selisih dari perbedaan pengakuan antara laba akuntansi komersial dan akuntansi fiskal akan mengakibatkan

adanya koreksi berupa koreksi positif dan koreksi negatif.

Debt Policy (Kebijakan Hutang)

Kebijakan hutang merupakan keputusan yang sangat penting dalam perusahaan. Dimana kebijakan hutang merupakan salah satu bagian dari kebijakan pendanaan perusahaan. Menurut (Kasmir, 2014) kebijakan hutang merupakan kebijakan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan hutang. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan utang merupakan kebijakan perusahaan dalam menggunakan utang sebagai sumber pendanaan di perusahaan.

Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir

H1 : Diduga *Finance Distress*, *Deferred Tax Expense* dan *Debt Policy* berpengaruh secara simultan Terhadap *Tax Avoidance*.

H2 : Diduga *Finance Distress* Berpengaruh positif Terhadap *Tax Avoidance*.

H3 : Diduga *Deferred Tax Expense* Berpengaruh negative Terhadap *Tax Avoidance*.

H4 : Diduga *Debt Policy* Berpengaruh negative Terhadap *Tax Avoidance*.

Hipotesis

Pengaruh secara simultan *Finance Distress*, *Deferred Tax Expense* dan *Debt Policy* Terhadap *Tax Avoidance*

Financial Distress adalah kondisi di mana aliran kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya (Arifin, 2018). Menurut Nadhifah dan Arif (2020), perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak dan mempertahankan kelangsungan operasionalnya. Hal ini diperkuat oleh Swandewi dan Noviari (2020) yang menemukan pengaruh positif signifikan antara *financial distress* dan *tax avoidance*. Teori Agency menjelaskan bahwa dalam situasi ini, konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal) dapat

mendorong manajer untuk mengoptimalkan laba setelah pajak demi menunjukkan kinerja keuangan yang baik.

Deferred Tax Expense adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi komersial dan laba fiskal. Menurut Harnanto (2013), perbedaan ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk menunda pembayaran pajak, sementara Veronica dan Kurnia (2021) mencatat bahwa alokasi pajak antarperiode yang tinggi cenderung mengurangi tingkat *Tax Avoidance*. Teori Stakeholder menyatakan bahwa strategi ini dapat memengaruhi persepsi pemangku kepentingan, seperti pemerintah dan masyarakat, terkait kontribusi pajak perusahaan. Dengan demikian, penggunaan *Deferred Tax Expense* secara optimal dapat mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan.

Debt Policy mengacu pada kebijakan perusahaan dalam menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan. Menurut (Harianto, 2020), perusahaan dengan beban pajak tinggi dapat memanfaatkan utang untuk menghasilkan penghematan pajak melalui pengurangan bunga. Sementara itu, (Ponirah, 2021) menyatakan bahwa meskipun *Debt Policy* dapat memengaruhi penghindaran pajak, dampaknya sering kali tidak signifikan. *Teori Signalling* menjelaskan bahwa kebijakan utang yang tercermin dalam laporan keuangan memberikan sinyal kepada pemangku kepentingan tentang strategi perusahaan, termasuk penggunaan utang untuk meminimalkan pajak.

Secara simultan, ketiga variabel ini saling berinteraksi untuk memengaruhi tingkat *tax avoidance* perusahaan. Dari sudut pandang teori keagenan adanya konflik kepentingan antara manajer dan pemerintah sebagai otoritas pajak, di mana perusahaan sering berupaya mengurangi beban pajak. Dari sudut *teori stakeholder* menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan melalui kepatuhan pajak. Sementara itu, *teori signalling* menunjukkan bahwa strategi-strategi ini juga memberikan sinyal kepada investor dan pihak luar terkait kondisi dan manajemen perusahaan.

H1: Diduga *Financial Distress*, *Deffered Tax Expense*, Dan *Debt Policy* Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Finance Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

Teori Agency menjelaskan bahwa terdapat kepentingan antara agen yang ingin kinerjanya dinilai baik oleh principal dan mendapatkan bonus sedangkan pihak principal ingin melihat kondisi rill perusahaan saat itu guna menentukan kebijakan apa yang akan dijalankan selanjutnya. (Yohanes, 2022). Teori signal menjelaskan bahwa sinyal informasi yang dibutuhkan investor untuk menentukan apakah seorang investor akan menanamkan sahamnya pada

suatu perusahaan. Teori Stakeholder menjelaskan bahwa Jika suatu perusahaan mengalami penurunan laba maka dapat digolongkan sebagai *financial distress*.

Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh (Alfarasi dan Muid, 2022) (oktavia dan Safii, 2023) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax Avoidance*.

H2: Diduga *Financial Distress* Berpengaruh positif Terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Deferred Tax Expense* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Harnanto (2014:115) mendefinisikan Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Selisih dari perbedaan pengakuan antara laba akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal yang akan menghasilkan koreksi berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan. Teori stakeholder menjelaskan bahwa Laba yang dilaporkan oleh manajemen tidak hanya menjadi tanggung jawab kepada stackholder saja, namun juga untuk kepentingan otoritas pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih et al., 2022) (Restu & Mu'arif, 2024) menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh negatif dan signifikan variabel beban pajak tangguhan secara parsial terhadap *tax avoidance*

H3: Diduga *Deferred Tax Expense* Berpengaruh negatif Terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Debt Policy* Terhadap *Tax Avoidance*

Agency theory menjelaskan bahwa *debt policy* bahwa perusahaan dengan beban pajak yang tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara meningkatkan utang perusahaan. Penambahan utang tersebut akan menimbulkan beban bunga yang dapat berupa mengurangi laba sebelum pajak, sehingga mengurangi biaya pajak yang harus dibayarkan kepada perusahaan (Harianto, 2020).

Teori *Signal* menjelaskan bahwa perusahaan dengan prospek menguntungkan akan berusaha menghindari penjualan saham dan meningkatkan modal baru yang diperlukan dengan cara lain, termasuk menggunakan hutang yang melebihi tujuan struktur modal normal.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Amalia & Firmansyah, 2022), Lestari & Solikhah (2019) menunjukkan bahwa Kebijakan utang berpengaruh negative terhadap *tax Avoidance*,

H4: Diduga *Debt Policy* Berpengaruh negatif Terhadap *Tax Avoidance*

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian berdasarkan filosofi positivisme, digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah diterapkan (Sugiyono, 2021) dalam. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil melalui website resmi BEI www.idx.co.id pada sektor property dan real estate periode 2018-2022. Populasi dalam penelitian ini yaitu pada sektor property dan real estate periode 2018-2022 dengan menggunakan teknik penarikan sampel menggunakan metode *purpose sampling* dengan kriteria sebagai berikut: 1) Perusahaan sektor *Properties and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018-2022. 2) Perusahaan sektor *Properties and Real Estate* yang tidak *delisting* sebelum tahun 2022. 3) Perusahaan sektor *Properties and Real Estate* menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah. 4) Perusahaan sektor *Properties and Real Estate* yang mengalami laba pada tahun 2018-2022. 5) Perusahaan sektor *Properties and Real Estate* yang memiliki data yang dibutuhkan terkait variabel penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dimana terdapat analisis statistic deskripsif, uji model regresi (CEM, FEM, REM), estimasi pemelihan model (Uji *Chow*, Uji *Hausman*, Uji *lagrange multiplier*), Uji Asumsi Klasik (uji normalitas, Uji multikolinearitas, Uji heteroskedastisitas, Uji auto korelasi), uji regersi linier berganda, Uji Koefisien determinasi, Uji F dan Uji t.

Operasional Variabel Penelitian

Tabel 3.1
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator pengukuran	skala
Tax Avoidance	$ETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
Financial Distress	$Z = 1.2A + 1.4B + 3.3C + 0.6D + 1E$	Rasio
Deferred Tax Expense	$DETR = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
Debt Policy	$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$	Rasio

Sumber: diolah peneliti

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.026102	2.77E+15	0.000464	0.368222
Median	0.006000	4.97E+14	2.15E-05	0.320000
Maximum	0.533700	1.08E+16	0.006634	0.870000
Minimum	-0.243700	3.33E+09	-0.003023	0.040000
Std. Dev.	0.119207	3.82E+15	0.001544	0.165863
Skewness	1.457327	1.076892	1.919211	0.610065
Kurtosis	9.441435	2.544292	8.685637	3.312909
Jarque-Bera	93.72618	9.087097	88.23742	2.974932
Probability	0.000000	0.010636	0.000000	0.225944
Sum	1.174600	1.25E+17	0.020900	16.57000
Sum Sq. Dev.	0.625255	6.43E+32	0.000105	1.216458
Observations	45	45	45	45

Sumber : Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

Estimasi Regresi Data Panel

Common Effect Model

Tabel 4.2
Hasil Uji Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.010665	0.045614	-0.233805	0.8163
X1	1.05E-17	4.51E-18	2.330544	0.0248
X2	-16.52939	1.104099	-1.497093	0.1420
X3	0.041634	0.103772	0.401201	0.6904
R-squared	0.164059	Mean dependent var	0.026102	
Adjusted R-squared	0.102893	S.D. dependent var	0.119207	
S.E. of regression	0.112908	Akaike info criterion	-1.439801	
Sum squared resid	0.522678	Schwarz criterion	-1.279209	
Log likelihood	36.39552	Hannan-Quinn criter.	-1.379934	
F-statistic	2.682183	Durbin-Watson stat	2.417737	
Prob(F-statistic)	0.059266			

Sumber : Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

Fixed Effect Model

Tabel 4.3
Hasil Uji Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.060620	0.113476	0.534215	0.5968
X1	-2.69E-17	3.48E-17	-0.779202	0.4414
X2	-52.17912	14.75018	-3.537525	0.0012
X3	0.174809	0.203608	0.858557	0.3968
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.475247	Mean dependent var	0.026102	
Adjusted R-squared	0.300330	S.D. dependent var	0.119207	
S.E. of regression	0.099712	Akaike info criterion	-1.549876	
Sum squared resid	0.328104	Schwarz criterion	-1.068099	
Log likelihood	46.87220	Hannan-Quinn criter.	-1.370274	
F-statistic	2.716977	Durbin-Watson stat	2.591683	
Prob(F-statistic)	0.012981			

Sumber : Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

Random Effect Model

Tabel 4.3
Hasil Uji Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.010665	0.040283	-0.264745	0.7925
X1	1.05E-17	3.98E-18	2.638959	0.0117
X2	-16.52939	9.750627	-1.695213	0.0976
X3	0.041634	0.091644	0.454294	0.6520

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.000000	0.0000
Idiosyncratic random		0.099712	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.164059	Mean dependent var	0.026102
Adjusted R-squared	0.102893	S.D. dependent var	0.119207
S.E. of regression	0.112908	Sum squared resid	0.522676
F-statistic	2.682183	Durbin-Watson stat	2.417737
Prob(F-statistic)	0.059266		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.164059	Mean dependent var	0.026102
Sum squared resid	0.522676	Durbin-Watson stat	2.417737

Sumber : Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

Estimasi Pemilihan Model Regresi Data Panel Uji Chow

Tabel 4.4
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.446198	(8,33)	0.0337
Cross-section Chi-square	20.953357	8	0.0073

Sumber : Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

Dari tabel 4.4 terlihat nilai probabilitas *Cross-Section Chisquare* yakni 0.0337 lebih besar dari level signifikansi $\alpha=5\%$ (0.05). Maka H_0 ditolak serta H_a diterima, hingga bisa diambil kesimpulan CEM lebih layak dipakai dibanding dengan FEM.

Uji Hausman

Tabel 4.5
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.671576	3	0.0021

Sumber : Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

Dari tabel di atas didapat nilai probability sejumlah 0.0021 artinya nilai tersebut lebih besar dari level signifikansi $\alpha = 5\%$ (0.05). Maka H_0 ditolak serta H_a

diterima, hingga bisa diambil kesimpulan FEM lebih layak digunakan dibanding REM.

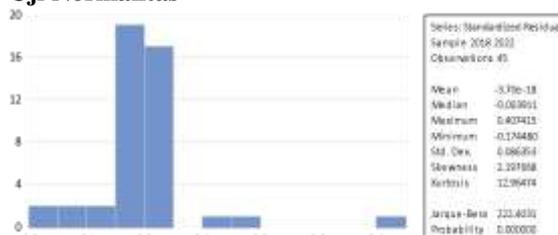
Kesimpulan Model

Tabel 4.6
Hasil Kesimpulan Model

Estimasi Pemilihan Model Regresi Data Panel	Pengujian	Hasil
Uji Chow	CEM vs FEM	FEM
Uji Hausman	FEM vs REM	FEM

Sumber : Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas



Sumber : Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas

Dari hasil uji normalitas diperoleh nilai probabilitas $0,000000 < 0,05$ hingga bisa disimpulkan data berdistribusi secara tidak normal. Namun menurut Widarjono (2018) regresi data panel memberikan alternatif model, *Common Effect* memakai metode *Ordinary Least Squared* (OLS). Di uji *Hausman* menggunakan model Fixed Effect dan Random Effect bahwa kedua memakai metode *Ordinary Least Squared* (OLS) dan *Generalized Least Squares* (GLS) sebagai teknik estimasi, dapat disimpulkan *Fixed Effect* (FEM) menggunakan pendekatan metode *Ordinary Least Squared* (OLS). Adapun cara untuk mendeteksi asumsi-asumsi OLS, jika estimator OLS tidak terpenuhi yang bersifat BLUE. Ada tiga asumsi yaitu: Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa uji normalitas tidak jadi syarat BLUE serta berbagai pendapat tak mewajibkan syarat ini menjadi sesuatu yang harus dipenuhi. Pada regresi data panel, tak seluruh uji asumsi klasik di metode OLS, hanya multikolinieritas serta heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas yakni uji untuk melakukan identifikasi hubungan antar variabel di regresi. Model regresi yang baik tak ada gejala korelasi antar variabel bebas, jika antar variabel independen ada korelasi cukup tinggi biasanya 0,85, ini menjadi indikasi gejala multikolinieritas (Ghozali, 2019). hasil serta uji multikolinieritas diperlihatkan di tabel ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.047682	-0.147210
X2	-0.047682	1.000000	-0.011286
X3	-0.147210	-0.011286	1.000000

Sumber : Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

Dari tabel 4.7 nilai korelasi tiap variabel bebas meliputi *Financial Distress*, *deferred tax expense* serta *Debt Policy* tak ada yang lebih besar dari 0,85 hingga bisa diambil kesimpulan model bebas dari gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.476004	Prob. F(3,41)	0.7007
Obs*R-squared	1.514578	Prob. Chi-Square(3)	0.6789
Scaled explained SS	5.708767	Prob. Chi-Square(3)	0.1267

Sumber : Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

Nilai Prob. Chi-Square sejumlah 0.6789 > 0,05, sehingga bisa diambil kesimpulan model bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 01/23/24 Time: 21:03
Sample: 1 45
Included observations: 45
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.002685	0.046989	0.056711	0.9551
X1	-3.98E-19	4.63E-16	-0.085880	0.9320
X2	3.609412	12.42464	0.290504	0.7730
X3	-0.005652	0.106435	-0.053106	0.9579
RESID(-1)	-0.115472	0.181917	-0.634752	0.5293
RESID(-2)	-0.094118	0.178048	-0.528609	0.6001

R-squared	0.014339	Mean dependent var	6.17E-18
Adjusted R-squared	-0.112028	S.D. dependent var	0.109004
S.E. of regression	0.114948	Akaike info criterion	-1.365111
Sum squared resid	0.515307	Schwarz criterion	-1.124222
Log likelihood	36.71499	Hannan-Quinn criter.	-1.275310
F-statistic	0.113468	Durbin-Watson stat	1.982557
Prob(F-statistic)	0.988698		

Sumber : Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

Nilai DW akhir dari model regresi sebesar 1.1.982557. Dari nilai DW 1.982557, nilai tersebut dikontraskan dengan nilai tabel signifikan sebesar 5% dengan jumlah sampel sebesar 45 (n) serta jumlah variabel independen sejumlah 3 (K-3), maka diperoleh nilai DU sejumlah 1.6662. tercapai. Nilai DW sejumlah 1,982557 > dari batas (DU) sejumlah 1,6662 dan kurang dari batas (4-DU) sebesar 2,3338. Hasilnya, dapat dinyatakan tak ada autokorelasi.

Uji Hipotesis
Analisis Regresi Data Panel

Tabel 4.10
Hasil Uji Analisis Data Panel

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 01/23/24 Time: 21:17
Sample: 2018 2022
Periods included: 5
Cross-sections included: 9
Total panel (balanced) observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.060620	0.113476	0.534215	0.5968
X1	-2.69E-17	3.46E-17	-0.779202	0.4414
X2	-52.17912	14.75016	-3.537525	0.0012
X3	0.174809	0.203608	0.858557	0.3988

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.475247	Mean dependent var	0.026102
Adjusted R-squared	0.300330	S.D. dependent var	0.119207
S.E. of regression	0.099712	Akaike info criterion	-1.549876
Sum squared resid	0.328104	Schwarz criterion	-1.058099
Log likelihood	46.87220	Hannan-Quinn criter.	-1.370274
F-statistic	2.716977	Durbin-Watson stat	2.591683
Prob(F-statistic)	0.012951		

Sumber : Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

Dari hasil Uji Regresi Linier berganda disajikan di tabel diatas, bisa dianalisa model regresi: $Y = 0.060620 - 2.69E17(X1) + (-52.17912)X2 + 0.174809(X3) + e$

Keterangan:

Y: *Tax Avoidance*

X1: *Financial Distress*

X2: *deferred tax expense*

X3: *Debt Policy*

e: Variabel diluar model (error)

Dari persamaan yang ada hubungan variabel independen pada variabel dependen bisa di interpretasikan dengan:

- 1) Nilai kons sebesar 0.060620 berarti apabila variabel independen yakni 0 atau tak ada maka variabel dependen.
- 2) Variabel *Financial Distress* (X1) memiliki nilai koefien regresi negatif sebesar -2.69-E17 ini yang menunjukkan bahwa setiap 1% kenaikan dari variabel *Financial Distress* (X1), maka akan berdampak penurunan bagi variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* akan mengalami penurunan sebesar -2.69-E17.
- 3) Variabel *deferred tax expense* (X2) memiliki nilai koefien regresi negatif sebesar -52.17912 ini yang menunjukkan bahwa setiap 1% kenaikan dari variabel *deferred tax expense* (X2), maka akan berdampak penurunan bagi variabel dependen yakni *Tax Avoidance* turun -52.17912.
- 4) Variabel *Debt Policy* (X3) memiliki nilai koefien regresi positif sejumlah 0.174809 ini menunjukkan tiap kenaikan 1% variabel *Debt Policy* (X3), maka variabel terikat yaitu *Tax Avoidance* akan mengalami kenaikan sebesar 0.174809.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.11
Hasil Uji Determinasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.475247	Mean dependent var	0.026102
Adjusted R-squared	0.300330	S.D. dependent var	0.119207
S.E. of regression	0.099712	Akaike info criterion	-1.549876
Sum squared resid	0.328104	Schwarz criterion	-1.068099
Log likelihood	46.87220	Hannan-Quinn criter.	-1.370274
F-statistic	2.716977	Durbin-Watson stat	2.591683
Prob(F-statistic)	0.012981		

Sumber : Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

Pada tabel ini nilai Adjusted R Square 0,300330 nilai yang dikenal koefisien determinasi (KD).

$$KD = 0,300330 \times 100\% = 30,033 \%$$

Hal ini menunjukkan 30,033 potensi pengaruh variabel independen yakni *Financial Distress*, *Deferred Tax Expense* dan *Debt Policy terhadap Tax Avoidance* yaitu variabel dependen. Sedangkan sisanya yaitu 69,967% diengaruhi variabel lain yang tak dipakai di penelitian ini misalnya profitabilitas, corporate governance, ukuran perusahaan.

Koefisien determinasi (Adjusted R2) untuk mengukur sejauh mana pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Derajat kepentingan besaran koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan variabel dalam model kemungkinan ada hubungannya dengan subjek penelitian. Nilai yang mendekati 0 berarti variabel dalam model tidak menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi meningkat seiring bertambahnya jumlah variabel independen dan volume data yang diamati.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.12
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.475247	Mean dependent var	0.026102
Adjusted R-squared	0.300330	S.D. dependent var	0.119207
S.E. of regression	0.099712	Akaike info criterion	-1.549876
Sum squared resid	0.328104	Schwarz criterion	-1.068099
Log likelihood	46.87220	Hannan-Quinn criter.	-1.370274
F-statistic	2.716977	Durbin-Watson stat	2.591683
Prob(F-statistic)	0.012981		

Sumber : Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

Dari tabel 4.12 diatas memperlihatkan nilai F-statistic 3.578984. Sementara rumus Ftabel yakni $df1 = k - 1 = 4 - 1 = 3$. Sedangkan $df2 = n - k = 45 - 4 = 41$. Dan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ hingga didapat F tabel di penelitian ini sejumlah 2.833. Dengan demikian F-statistic 2.716977 > Ftabel 2.833 dengan nilai Prob (F-statistic) 0.012981 < 0.05, hingga ditarik kesimpulan dalam penelitian variabel independen dalam penelitian meliputi *Financial Distress*, *Deferred Tax Expense* dan *Debt*

Policy secara bersamaan berpengaruh pada *Tax Avoidance* dan model penelitian ini dinyatakan layak.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.13
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.060620	0.113476	0.534215	0.5968
X1	-2.69E-17	3.46E-17	-0.779202	0.4414
X2	-52.17912	14.75018	-3.537525	0.0012
X3	0.174809	0.203608	0.858557	0.3968

Sumber : Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

1. Kriteria pengambilan keputusan di uji t adalah apabila nilai probabilitas signifikan 0,05 hingga dinyatakan variabel independen tak memberi pengaruh pada variabel dependen. Jika nilai probabilitas signifikan < 0,05 hingga dinyatakan variabel independen punya pengaruh pada variabel dependen. Karenanya, bisa diambil kesimpulan hasil individualnya yakni:
2. Variabel *Financial Distress* nilai signifikan 0.4414 > 0.05 (0.4414>0.05) hingga bisa diambil kesimpulan *Financial Distress* berpengaruh pada *Tax Avoidance* ditolak.
3. Variabel *Deferred Tax Expense* nilai signifikan 0.0012 < 0.05 (0.0012<0.05) hingga bisa diambil kesimpulan menyatakan bahwa *Deferred Tax Expense* Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* diterima.
4. Variabel *Debt Policy* nilai signifikan 0.3968 > 0.05 (0.3968>0.05) hingga bisa diambil kesimpulan *Debt Policy* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ditolak.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh *Financial Distress*, *Deferred Tax Expense* dan *Debt Policy terhadap Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa *Financial Distress*, *Deferred Tax Expense* dan *Debt Policy* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak dari setiap strategi tax avoidance terhadap pemangku kepentingan dan persepsi pasar. Dalam kerangka *stakeholder theory*, perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara efisiensi pajak dan kewajiban sosial. Berdasarkan *agency theory*, kebijakan pajak yang adil dari pemerintah akan membantu meminimalkan konflik kepentingan antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak. Sedangkan dari perspektif *signalling theory*, manajemen diharapkan lebih transparan dalam melaporkan strategi pajak yang dilakukan agar informasi ini menjadi sinyal yang tepat bagi investor tentang nilai jangka panjang perusahaan.

Tax Avoidance merupakan cara manajemen pajak mengurangi pembayaran pajak dari nominal yang harusnya dibayar, Namun hal tersebut dilakukan secara legal memanfaatkan celah di UU Perpajakan. Perusahaan yang mengalami kemerosotan ekonomi dan keuangan secara signifikan sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kebangkrutan atau kesulitan keuangan, dapat meningkatkan potensi penghindaran pajak, sehingga perusahaan tersebut tetap dapat beroperasi. Perusahaan yang mempunyai laba fiskal dan akuntansi yang berbeda menunjukkan bahwa peningkatan tindakan manajemen akan menyebabkan peningkatan beban pajak tangguhan, hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Semakin panjang jangka waktunya maka semakin besar pula persentase penghindaran pajak. Namun, perusahaan yang menambah utangnya harus membayar bunga atas utang tersebut, sehingga mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa *financial distress* tak memberi pengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak. *Financial distress* memang merugikan suatu perusahaan, serta wajib ditangani dengan hati-hati sebab jika kebijakan dan prosedur tidak tepat maka akibatnya akan memperburuk kondisi perusahaan dan kemungkinan terjadinya kebangkrutan usaha. Hal ini tak diinginkan seluruh pihak yang terlibat dan sebagian besar dihindari oleh investor. Banyak pihak umumnya disertakan manajemen perusahaan mengatasi kondisi tersebut, langkah awal biasanya akan dilakukan oleh berbagai konsultan, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun pajak, yang akan bekerja pada perusahaan beserta kreditur dan debiturnya guna menjaga kelangsungan hidup perusahaan. arus kas perusahaan dan menjaganya tetap berjalan lancar.

Keberlangsungan usaha yang panjang dan mantap merupakan harapan setiap pemegang saham dan investor perusahaan, hal ini dapat memberikan dampak positif bagi pemangku kepentingan dan investor lainnya terkait perusahaan. Untuk menggapai tujuan bersama, manajemen perusahaan harus mampu bergerak secara hati-hati dan presisi guna menyeimbangkan beragam kepentingan terkait perusahaan, termasuk menjaga stabilitas keuangan sekaligus memenuhi berbagai kewajiban. Tentu saja manajemen perusahaan tidak dapat bertindak sendiri, namun dapat mengambil sebagian dana untuk meminta bantuan dan masukan dari pihak lain di luar perusahaan yang dianggap ahli di bidangnya masing-masing sehingga merupakan “investasi” tidak langsung.

Banyak perusahaan yang menganggap kewajiban perpajakan sebagai biaya yang harus

ditekan semaksimal mungkin dengan banyak cara dan kebijakan, dengan menjaga keselamatan bagi perusahaan serta mengikuti aturan perundangan terkait. Di sinilah peran penting dari beragam pakar keuangan dan perpajakan perusahaan guna memberi berbagai bimbingan dan masukan ke manajemen mengenai penghindaran pajak dan pengamanan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian ini selaras penelitian (Hermawan dan Aryati, 2022) menunjukkan *financial hardship* tidak memberi pengaruh pada advokasi pajak. Temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian (Alfarasi dan Muid, 2022) memperlihatkan kesulitan keuangan berdampak positif dan signifikan pada pertahanan pajak.

Pengaruh *Deferred Tax Expense* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak. beban pajak tangguhan merupakan hasil selisih sementara antara penghasilan kena pajak laporan keuangan dengan penghasilan kena pajak laporan fiskal, hal ini digunakan untuk menghitung utang pajak. menurut *Stakeholder Theory*, perusahaan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang dapat mengurangi kontribusi pajak perusahaan saat ini. Dari sudut pandang stakeholder, hal ini bisa dianggap negatif karena perusahaan tampak mengabaikan kontribusi optimal terhadap pendapatan negara.

Dalam *Signalling Theory*, laporan keuangan adalah sinyal bagi investor tentang kondisi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *deferred tax expense* yang signifikan terhadap penghindaran pajak dapat diartikan sebagai strategi perusahaan untuk menunda pajak guna meningkatkan arus kas jangka pendek, yang dapat menarik minat investor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gula & Mulyani, 2020), (Sumantri, 2018) *deferred tax expense* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Suciarti et al., 2020) yang menunjukkan bahwa *deferred tax expense* sebagian tidak berpengaruh signifikan pada Penghindaran Pajak.

Pengaruh *Debt Policy* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa kebijakan utang tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Keputusan pendanaan berdasarkan utang belum tentu digunakan sebagai sarana penghindaran pajak oleh manajer. Meskipun perusahaan mengalami memiliki kebijakan utang tertentu, manajer tidak selalu terdorong untuk melakukan tax

avoidance. Dalam *agency theory*, manajer mungkin mempertimbangkan bahwa strategi penghindaran pajak terlalu berisiko jika perusahaan berada dalam memiliki utang yang tinggi, yang bisa memengaruhi stabilitas jangka panjang perusahaan. *Debt policy* tidak signifikan dalam memengaruhi *tax avoidance* dapat dianggap sebagai hasil positif dari perspektif *stakeholder theory*. Artinya, meskipun perusahaan menerapkan kebijakan utang yang tinggi, perusahaan tidak serta-merta menghindari kewajiban pajaknya, sehingga menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial mereka. *Debt policy* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang bisa memberikan sinyal positif. Investor mungkin menginterpretasikan ini sebagai tanda bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak yang agresif, meskipun berada dalam kondisi memiliki utang tinggi, sehingga perusahaan tetap mematuhi aturan perpajakan dan mempertimbangkan keberlanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ponirah, 2021) yang menunjukkan bahwa pengelolaan utang tidak berdampak signifikan. Hasil investigasi ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Harianto, 2020) yang menunjukkan bahwa pengelolaan utang berpengaruh terhadap advokasi perpajakan.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan tentang pengaruh Financial Distress, Deferred Tax Expense dan Debt Policy terhadap Tax Avoidance, maka dapat disimpulkan:

1. Secara simultan menunjukkan bahwa variabel *Financial Distress*, *Deferred Tax Expense* dan *Debt Policy* memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
2. Secara parsial menunjukkan bahwa variabel *Financial Distress* tidak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*, karena *financial distress* merugikan perusahaan dan harus ditangani hati-hati.
3. Secara parsial menunjukkan bahwa variabel *Deferred Tax Expense* memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*, strategi perusahaan untuk menunda pajak guna meningkatkan arus kas jangka pendek, yang dapat menarik minat investor.
4. Secara parsial menunjukkan bahwa variabel *Debt Policy* tidak memiliki pengaruh negative signifikan terhadap *Tax Avoidance*, perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak yang agresif, meskipun berada dalam kondisi memiliki utang tinggi

5.2. Saran

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah sampel dengan mencakup perusahaan dari berbagai sektor di Bursa Efek

Indonesia (BEI). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan generalisasi hasil penelitian sehingga dapat berlaku untuk lebih banyak konteks industri.

2. Menggunakan data dengan rentang waktu yang lebih panjang untuk menangkap dinamika yang lebih komprehensif. Selain itu, mempertimbangkan data sebelum dan sesudah kondisi khusus, seperti pandemi atau perubahan regulasi pajak, dapat memberikan wawasan lebih kaya.
3. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel lain yang relevan, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, kualitas audit, atau corporate governance, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. Z. (2019). Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2(6). <https://doi.org/10.24912/jmbk.v2i6.4900>
- Chandra, A., & Sundarta, M. I. (2022). Fenomena Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dan Perencanaan Pajak (Tax Planning). *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 51–62. <https://doi.org/10.32832/neraca.v11i1.885>
- Dewi, C. S., & Estrini, D. H. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Maneksi*, 13(1), 248–254. <https://doi.org/10.31959/jm.v13i1.2150>
- Fikarunia, & Ferdiansyah. (2022). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Komite Audit, Dan Reputasi Auditor Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 27–35.
- Gian, G. A. P., Eva Herianti, & Sabaruddin. (2022). Property dan Real Estate Pengaruh Financial Distress dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance, Peran Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 5(2), 190–207. <https://doi.org/10.35814/jrb.v5i2.2327>
- Gula, V. E., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Capital Intensity Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance Dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2012, 1–7. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6882>
- Harianto, R. (2020). *PENGARUH STRATEGI BISNIS, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEBIJAKAN UTANG TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Kasus Pada*

- Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018* (Vol. 02, Issue 1).
- Ida Ayu Putu Wira Yanti and I Nyoman Putra Yasa. (2022). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Financial Distress, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(3), 818–826.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Also published in Foundations of Organizational Strategy. *Journal of Financial Economics*, 4, 305–360.
<http://ssrn.com/abstract=94043>
[availableat:http://ssrn.com/abstract=94043](http://ssrn.com/abstract=94043)
<http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Kasmir. (2014). Analisis Laporan Keuangan, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh. *Raja Grafindo Persada*, V(2015).
- Panjaitan, T. T., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019 – 2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 195–206.
<https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2331>
- Pardosi, H., & Hutabarat, F. (2022). Pengaruh Cash Effective Tax Rate, Pajak Tangguhan Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba (Study Kasus Perusahaan Index Idx30). *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(2).
<https://doi.org/10.52447/map.v7i2.6627>
- Pohan, C. A. (2013). Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. In *Salemba Empat*.
- Ponirah, A. (2021). PENGARUH ASSET INTENSITY DAN DEBT POLICY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG BERGERAK DI BIDANG PERTAMBANGAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIDOE 2011-2020. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3(2).
<https://doi.org/10.15575/aksy.v3i2.14050>
- Putri, Rizal, & Vidiyanna. (2020). Pengaruh Inventory Intensity dan Debt Policy Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 118–125.
<http://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. In *Rekayasa Sains*.
- Septiani, D., Ferdiansyah, & Sunarto. (2024). Analisis Pengaruh Penilaian Kesehatan Bank dan Tax Avoidance Pada Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional. 7(2), 1–12.
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *Quarterly Journal of Economics*.
<https://doi.org/10.2307/1882010>
- Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia, K. (2020). The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 76–83.
<https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.28624>
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Tindakan). In *Metode Penelitian Pendidikan*.
- Sumantri, I. I. (2018). Pengaruh Insentif Pajak, Growth Opportunity, Dan Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi Empiris pada Sektor Industri dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2015). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 122–145.
- Waluyo, W. (2018). THE EFFECT OF ADDITION OF TAXPAYERS NUMBER, TAX AUDIT, TAX BILLING, AND TAXPAYERS COMPLIANCE TOWARD TAX REVENUE. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 1(1).
<https://doi.org/10.33062/ajb.v1i1.75>